

Judul : Solusi lingkungan, perkebunan sawit diganti Polonia
Tanggal : Rabu, 13 Agustus 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Solusi Lingkungan

Perkebunan Sawit Diganti Polonia

ANGGOTA Komisi IV DPR Firman Soebagyo mengusulkan agar perkebunan kelapa sawit bermasalah dikonversi menjadi tanaman Polonia. Tanaman ini memiliki nilai ekonomi tinggi sekaligus berperan besar dalam penyerapan karbon.

"Dari sisi lingkungan, kemampuannya dalam penyerapan karbon juga luar biasa. Ini adalah terobosan baru yang perlu kita dorong," ujar Firman usai kunjungan kerja reses Komisi IV DPR ke Bontang Mangrove Park, Kota Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim), Senin (11/8/2025).

Berdasarkan informasi dari Gubernur Kaltim, harga jual Polonia per ton jauh lebih tinggi daripada batubara.

Karena itu, Firman meyakini konversi lahan sawit bermasalah menjadi Polonia dapat menjadi solusi menguntungkan secara ekonomi sekaligus mendukung agenda mitigasi

perubahan iklim.

Dalam kesempatan tersebut, Firman juga mendorong pelestarian hutan mangrove di kawasan Bontang yang merupakan warisan kesultanan setempat. Dulu, hutan tersebut mencapai 36 ribu hektare, tapi kini tersisa separuhnya.

"Mangrove adalah paru-paru dunia. Kawasan ini wajib dilestarikan dan bisa dijadikan objek taman wisata yang lebih produktif," ucapnya.

Meski mengapresiasi keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga mangrove, Firman menilai, kontribusi ekonomi dari sektor ini masih rendah.

Dari catatannya, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari kawasan tersebut baru sekitar Rp 600 juta per tahun.

"Mungkin karena fasilitas wisata yang belum maksimal, maka perlu kita dorong perbaikannya," imbuhnya.

Firman berharap, pengembangan hutan mangrove dilakukan tanpa memaksakan lahan yang tidak sesuai peruntukan menjadi area pangan. Lebih baik memanfaatkan potensi ekonomi dari sumber daya yang memang cocok, seperti Polonia atau alternatif lain yang bernilai tinggi dan mampu menyerap karbon optimal.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Panggah Susanto menambahkan, pihaknya sepakat mendorong pengelolaan kawasan hutan seluas 12,5 juta hektare di Kaltim secara terpadu, dengan memadukan fungsi konservasi, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi hijau.

Menurutnya, Kaltim memiliki keunggulan yang jarang dimiliki daerah lain, baik dari sisi luas wilayah kehutanan, potensi reklamasi pascatambang, maupun peluang pariwisata alam.

Pengelolaan potensi ini harus dilakukan secara terintegrasi

antara pemerintah pusat, daerah dan pemangku kepentingan.

"Dengan sinergi antara DPR, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota Bontang, kita bisa menciptakan industri produktif sekaligus menjaga kelestarian lingkungan," ujar Panggah.

Panggah menilai, kerja sama lintas level pemerintahan menjadi kunci untuk memaksimalkan potensi tersebut. Salah satu tindak lanjutnya adalah membentuk tim teknis yang solid, sehingga potensi kehutanan, tambang, pangan dan wisata alam dapat dikembangkan secara terukur.

Hambatan seperti akses jalan dan sarana penunjang harus diatasi bersama, apalagi Kaltim merupakan salah satu penopang ekonomi nasional.

"Dengan manajemen yang tepat, daerah ini bisa menjadi contoh keberhasilan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berdaya saing

global," katanya.

Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud mengapresiasi perhatian Komisi IV DPR terhadap isu pengelolaan hutan dan reklamasi. Menurutnya, Kaltim memiliki peluang menjadi pionir pengembangan ekonomi berbasis sumber daya terbarukan.

Dia ingin mengubah paradigma dari eksploitasi sumber daya tak terbarukan menjadi pengelolaan berbasis sumber daya terbarukan, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Salah satu inovasi yang diperkenalkan adalah penanaman Polonia di lahan reklamasi bekas tambang, yang memiliki siklus panen cepat dan nilai ekonomi tinggi.

"Penguatan ekosistem mangrove dan pengelolaan kawasan konservasi juga jadi prioritas. Kami berharap potensi ini bisa menjadi sumber pendapatan baru sekaligus menjaga ekosistem di Kaltim," tutup Rudy. ■ **PYB**